FREEPORT-MCMORAN COPPER & GOLD

KEBIJAAKAN ANTI-KORUPSI

Kebijakan Kepatuhan Global

Desember 2012

PENDAHULUAN

Tujuan

Tujuan dari Kebijakan Anti-Korupsi (“Kebijakan”) ini adalah untuk membantu memastikan kepatuhan oleh Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc. (“FCX”) dan afiliasinya (“Perusahaan”) dengan undang-undang anti-korupsi global. Undang-undang tersebut di antaranya adalah Undang-Undang AS tentang Praktik Korupsi di Luar Negeri tahun 1977, sebagaimana yang telah ditambahkan (“FCPA” atau “Undang-Undang”) dan hukum lokal yang terkait di negara-negara di mana FCX beroperasi, baik yang terkait dengan sektor publik, sektor swasta, maupun kedua-duanya.

Undang-undang anti-korupsi ini melarang suap kepada Pejabat Pemerintah Non-AS (selanjutnya disebut "Pejabat Pemerintah"). FCPA secara khusus melarang warga AS dan perusahaan-perusahaan, petugas, direktur, karyawan dan agen serta setiap pemegang saham yang bertindak atas nama mereka sendiri untuk menyuap Pejabat Pemerintah. FCPA juga mewajibkan perusahaan AS untuk melakukan pembukuan dan pencatatan yang akurat dan lengkap dan menjaga kontrol akunting internal yang benar.

Semua personel Perusahaan dan pihak ketiga yang bertindak mewakili Perusahaan diharapkan untuk melaksanakan bisnis Perusahaan secara sah dan beretika. Perusahaan dilarang menggunakan dana atau asetnya untuk tujuan yang melanggar hukum, tidak pantas, atau tidak etis. Pemberian hadiah yang tidak wajar, pembayaran atau penawaran semua hal yang bernilai kepada Pejabat Pemerintah atau mitra komersial juga dapat merusak reputasi dan pertumbuhan Perusahaan. Sebagaimana yang telah ditetapkan di dalam Prinsip Kode Etik Bisnis FCX, FCX melarang penyuapan Pejabat Pemerintah, atau mitra komersial dan mengharapkan kepatuhan sepenuhnya atas semua undang-undang anti-korupsi, termasuk FCPA, oleh siapa saka yang bekerja mewakili Perusahaan.

Selanjutnya FCX mengharapkan afiliasinya untuk menerapkan kebijakan dan prosedur yang mendidik karyawan tentang undang-undang anti-korupsi dan yang dirancang untuk membudayakan kepatuhan dengan undang-undang yang berlaku, berdasarkan profil risiko spesifik dari afiliasi tersebut.

Tentang Kebijakan Ini

Kebijakan ini berlaku untuk FCX dan anak-anak perusahaannya, juga setiap joint venture FCX atau usaha bisnis di mana FCX atau anak perusahaan FCX merupakan pemilik mayoritas (bersama-sama disebut sebagai “Perusahaan”).

Kebijakan ini berlaku untuk *semua* operasional Perusahaan baik domestik maupun asing, termasuk operasional yang dijalankan oleh divisi, departemen, anak perusahaan, agen, konsultan atau perwakilan lain mana saja, juga operasional dari setiap joint venture atau usaha bisnis lainnya di luar Amerika Serikat yang mana Perusahaan merupakan pemilik mayoritasnya. Kebijakan ini juga berlaku untuk semua aktivitas pencatatan keuangan Perusahaan.

Dalam tanggung jawab pekerjaan kita sehari-hari, kita seringkali berhubungan dengan Pejabat Pemerintah. Misalnya, meminta hak eksplorasi dan mengembangkan aset pertambangan - baik melalui penyerahan penawaran tender, negosiasi langsung dengan pemerintah asing atau membeli konsesi yang ada saat ini yang memerlukan persetujuan pemerintah. Konstruksi skala besar untuk proyek juga seringkali membutuhkan izin. Demikian pula untuk barang dan peralatan yang digunakan di dalam operasional kita serta produk-produk yang secara rutin harus melalui bea cukai. Operasional kita juga merupakan bidang yang sangat diatur. Di beberapa negara, Pejabat Pemerintah mungkin meminta—baik secara langsung maupun tidak langsung—pembayaran yang tidak wajar terkait dengan operasional Perusahaan. Semua hal tersebut merupakan contoh situasi yang membutuhkan kecermatan kita dalam mematuhi undang-undang anti-korupsi.

Jika tanggung jawab pekerjaan Anda membawa Anda pada bidang-bidang yang dicakup oleh undang-undang anti-korupsi, pastikan untuk memahami Panduan Kepatuhan Anti-Korupsi Perusahaan, yang ditetapkan di dalam kebijakan FCPA dan prosedur Perusahaan secara mendetail. Panduan ini dapat ditemukan di situs Intranet agar mudah diakses. Banyak operasional Perusahaan di luar AS perlu menerapkan kebijakan lokal untuk menerapkan kebijakan dan Panduan ini, untuk mematuhi undang-undang anti-korupsi setempat dan membuat prosedur untuk mengevaluasi dan menyetujui transaksi yang mengandung risiko anti-korupsi, seperti pembayaran kepada pejabat dan pemerintah asing.

Kebijakan ini menggantikan kebijakan versi tahun 2008.

1 RANGKUMAN FCPA

1.1 Pembayaran yang dilarang

Ketentuan anti-suap FCPA melarang penyuapan kepada Pejabat Pemerintah untuk memperoleh atau mempertahankan bisnis atau keuntungan yang tidak wajar. Secara spesifik FCPA melarang tindakan, penawaran, janji, atau wewenang pemberian hadiah, pembayaran, atau bentuk lain yang bernilai, dengan niat korupsi, kepada Pejabat Pemerintah. FCPA tidak membuat pengecualian untuk kasus pejabat resmi yang memohon, atau meminta, pembayaran yang tidak wajar. Untuk keperluan kebijakan ini, "Pejabat Pemerintah" mencakup semua orang berikut ini:

Jenis Pejabat Pemerintah	Contoh
Pejabat atau karyawan setiap lembaga nasional, regional, lokal atau lembaga pemerintah lainnya	Pemeriksa bea cukai, petugas polisi, atau menteri pemerintahan
Pejabat yang terpilih	Wali kota, legislator/pembuat undang-undang, atau anggota dewan
Pejabat atau karyawan perusahaan yang dimiliki atau dikendalikan oleh pemerintah	CEO perusahaan pertambangan China
Individu pribadi yang untuk sementara bertindak sebagai pejabat resmi untuk atau mewakili lembaga pemerintah	Konsultan pemerintah yang bertindak mewakili otoritas pemerintah
Calon pejabat politik atau pemerintahan terpilih	Calon wakil rakyat setempat
Partai politik atau pejabat partai	Pimpinan partai politik setempat
Pejabat, karyawan, atau perwakilan organisasi publik internasional	Karyawan Bank Dunia/World Bank, Inter-American Development Bank atau Perserikatan Bangsa-Bangsa.
Anggota keluarga setiap orang yang disebut di atas	Pasangan/suami atau istri Menteri Pertambangan

Sementara daftar di atas sudah cukup jelas, ada banyak jenis Pejabat Pemerintah yang tidak hanya sekadar pejabat yang terpilih. Pejabat Pemerintah dapat berada pada jenjang pemerintah mana pun, baik lokal. regional, maupun nasional.

FCPA melarang pembayaran langsung maupun tidak langsung kepada Pejabat Pemerintah. Ini berarti bahwa Perusahaan dan individu yang terlibat dapat dimintai pertanggungjawabannya berdasarkan baik pembayaran yang dilakukan oleh karyawan FCX maupun oleh pihak ketiga. “Pihak ketiga” mencakup konsultan, agen, kontraktor, dan individu atau lembaga lain yang mewakili FCX di depan pihak atau pejabat yang berwenang, atau berinteraksi dengan pemerintah atas nama Perusahaan.Contoh pihak ketiga diantaranya:

- Agen pelisensi;
- Penyedia layanan dari luar yang ditunjuk;
- Agen atau pejabat yang berinteraksi dengan pejabat bea cukai atas nama perusahaan;
- Konsultan hubungan pemerintah;
- Konsultan yang digunakan untuk membantu mendapatkan izin atau lisensi; dan
- Pengacara luar, akuntan, dan penasihat pajak yang berinteraksi dengan Pejabat Pemerintah.

Untuk mematuhi FCPA, kebijakan ini menetapkan aturan yang jelas: karyawan, pihak ketiga, dan mitra bisnis dilarang melakukan, menawarkan, menjanjikan atau memberi wewenang pemberian hadiah, pembayaran, atau benda-benda yang bernilai kepada Pejabat Pemerintah. Menurut aturan ini, pembayaran juga tidak boleh dilakukan atau dijanjikan kepada pihak ketiga mana pun yang mungkin menyediakan hadiah, pembayaran, atau transfer benda-benda yang bernilai kepada Pejabat Pemerintah. Satu-satunya pengecualian atas aturan ini adalah pembayaran yang secara khusus telah diizinkan oleh Kebijakan ini, atau pembayaran yang telah diberikan wewenangnya menurut panduan, kebijakan, atau prosedur FCX atau afiliasinya yang berlaku, sesuai dengan Kebijakan ini.

1.2 Pembayaran yang diizinkan

FCPA mengizinkan beberapa jenis pembayaran kepada Pejabat Pemerintah dalam keadaan yang sangat terbatas. Misalnya, FCPA membolehkan pembayaran "kelancaran" atau "pelicin" kepada Pejabat Pemerintah untuk memperoleh tindakan pemerintah yang tidak mengharuskan pertimbangan, rutin dan tidak melanggar hukum. Tindakan tersebut di antaranya mencakup perolehan izin rutin untuk melakukan bisnis di negara asing, permintaan perlindungan polisi atau pemrosesan visa, faktur bea cukai atau dokumen pemerintah lainnya sesuai dengan permintaan yang benar. Namun demikian, pembayaran seperti ini mungkin dilarang oleh undang-undang lainnya yang berlaku dan dapat menimbulkan banyak masalah yang kompleks. Karena itulah, di dalam Kebijakan ini, pembayaran kemudahan sangat tidak dianjurkan dan sedapat mungkin harus dihindari.

Anda hanya dapat melakukan pembayaran kemudahan jika Panduan Kepatuhan Anti-Korupsi Perusahaan dan semua peraturan dan prosedur setempat diikuti, dan hanya setelah semua persetujuan telah diperoleh. Afiliasi FCX disarankan untuk mengambil langkah-langkah untuk mengurangi dan, seiring perkembangan waktu, meniadakan pembayaran seperti ini. Jika peraturan afiliasi setempat melarang pembayaran seperti ini, kebijakan setempat harus diikuti. Dalam kasus mana pun, dokumentasi dan pencatatan secara lengkap wajib dilakukan, sebagaimana yang telah dibahas di dalam Panduan Kepatuhan Anti-Korupsi.

FCPA juga mengizinkan berbagai jenis pengeluaran promosi untuk situasi yang bukan untuk keperluan korupsi. Misalnya, pengeluaran yang wajar, dan *bona fide*/beralasan tertentu yang terjadi saat mempromosikan Perusahaan kepada Pejabat Pemerintah, penyelenggaraan tur Pejabat Pemerintah di lokasi perusahaan, atau menjamu mereka dapat diizinkan. Namun pelaksanaan jenis pembayaran seperti ini perlu dilakukan secara hati-hati untuk memastikan agar tidak melibatkan kegiatan atau manfaat yang tidak wajar. Jangan memberikan hadiah atau jamuan kepada Pejabat Pemerintah atau memberikan wewenang untuk mengeluarkan biaya promosi atau acara untuk Pejabat Pemerintah tanpa mengikuti Panduan Kepatuhan Anti-Korupsi Perusahaan dan semua kebijakan dan prosedur setempat serta memperoleh persetujuan sebagaimana mestinya.

Selain itu, semua pengeluaran, termasuk pembayaran kemudahan atau promosi, harus dijelaskan secara lengkap dan akurat di dalam pembukuan dan pencatatan kita serta dalam pos pengeluaran yang ditetapkan.

1.3 Praktik pencatatan, akunting, dan pembuatan laporan

Ketentuan pencatatan FCPA mewajibkan perusahaan AS yang sahamnya dimiliki oleh publik seperti FCX untuk menyimpan pembukuan, pencatatan, dan rekening yang lengkap dan akurat serta mencerminkan secara wajar semua transaksi dan penghapusan aset secara dalam detail yang wajar. Manipulasi atau penghilangan setiap transaksi pada pembukuan kita, atau kegagalan untuk menjaga kontrol akunting yang benar yang mengakibatkan manipulasi dan penghapusan adalah dilarang. Oleh karena itu sangat penting menjaga deskripsi yang mendetail, akurat atas semua pembayaran dan pengeluaran.

Kita harus mengikuti semua standar, prinsip, undang-undang, dan praktik akunting dan pembuatan laporan keuangan Perusahaan yang berlaku. Manajemen mewajibkan penyiapan semua laporan dan catatan secara tepat waktu dan lengkap. Saat berhubungan dengan Pejabat Pemerintah, dan dalam transaksi lainnya sebagaimana yang dijelaskan di dalam Kebijakan ini, mintalah semua persetujuan wajib secara tertulis. Selanjutnya berikanlah dokumentasi tersebut kepada pengontrol setempat untuk dicatat sebagaimana mestinya. Sebelum membayar atau memberikan izin pembayaran kepada Pejabat Pemerintah, pastikan bahwa tidak ada bagian dari pembayaran tersebut yang digunakan untuk tujuan lain apa pun selain daripada yang digambarkan secara lengkap dan akurat di dalam pembukuan dan catatan Perusahaan. Transaksi Perusahaan yang tertutup atau tidak tercatat dilarang dilakukan untuk tujuan apa pun. Dilarang membuat transaksi palsu atau rekaan.

Setiap pembayaran kepada, atau pengeluaran promosi untuk Pejabat Pemerintah harus diteliti secara cermat dan dicatat dengan benar. Komponen terpisah mungkin diperlukan untuk mencatat transaksi ini dengan benar dan semua dokumen pendukung harus diperoleh untuk keperluan audit. Panduan Kepatuhan Anti-Korupsi menguraikan persyaratan pembuatan laporan spesifik untuk transaksi yang diizinkan, seperti pembayaran kemudahan dan pengeluaran promosi untuk Pejabat Pemerintah.

Dana pribadi tidak boleh digunakan untuk melakukan hal-hal yang dilarang oleh kebijakan Perusahaan.

1.4 Mitra bisnis perusahaan

Perusahaan akan bersaing sekuat tenaga untuk memperoleh semua peluang bisnis dengan cara yang adil dan sah serta akan menegosiasikan kontrak secara adil dan terbuka. Tanpa mengindahkan setiap tekanan yang dilakukan oleh Pejabat Pemerintah, Perusahaan akan menjalankan bisnis dengan cara-cara yang sah dan etis. Praktik kejujuran dan profesionalisme ini juga harus dilaksanakan pada aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh mitra pihak ketiga, konsorsium, dan joint venture Perusahaan. Berhati-hatilah saat menghindari situasi yang melibatkan pihak ketiga ini atau jenis pihak ketiga lainnya yang dapat mengakibatkan pelanggaran atas FCPA. Sebelum mengikatkan diri dalam perjanjian dengan pihak ketiga mana pun yang mewakili Perusahaan dan mungkin berinteraksi dengan pemerintah, pastikan untuk menjalankan dan mendokumentasikan uji ketuntasan berbasis risiko yang terkait FCPA sebagaimana mestinya. Mintalah jaminan kepatuhan tertentu dari pihak ketiga. Uji ketuntasan pada mitra bisnis lainnya mungkin juga diwajibkan untuk memastikan bahwa Perusahaan melakukan bisnis dengan mitra yang tepat dan berkualifikasi

1.5 Hukuman dan konsekuensi ketidakpatuhan

FCPA menjatuhkan kewajiban pidana bagi individu dan perusahaan. Bagi individu yang melanggar ketentuan anti-suap FCPA, hukuman pidananya mencakup:

- Denda dalam jumlah besar;
- Pelepasan hak manfaat/tunjangan;
- Kurungan hingga lima tahun untuk setiap pelanggaran; dan
- Hukuman lainnya.

Penuntut juga dapat menggunakan ketentuan akunting FCPA atau hukum pidana AS lainnya, seperti konspirasi dan undang-undang pencucian uang, yang juga menjatuhkan hukuman yang berat. Perusahaan tidak boleh mengganti uang denda yang dijatuhkan kepada individu. Perusahaan juga dapat dijatuhi denda dan hukuman pidana, serta dapat diharuskan untuk mengembalikan keuntungan dari bisnis yang dianggap diperoleh secara tidak pantas.

Ada banyak konsekuensi negatif FCPA lainnya karena ketidakpatuhan. Penyelidikan untuk menyelesaikan dugaan pelanggaran menghabiskan waktu dan sumber daya perusahaan yang besar, walaupun hasilnya berpihak pada Perusahaan. Penyelidikan di Amerika Serikat dapat memicu penyelidikan di negara-negara lain, dan sebaliknya. Hukuman lainnya dapat diberlakukan di bawah hukum negara-negara selain dari Amerika Serikat. Dugaan pelanggaran terhadap FCPA dapat membahayakan reputasi dan hubungan masyarakat perusahaan atau individu yang sangat serius.

Pelanggaran FCPA juga akan mengakibatkan diambilnya tindakan pendisiplinan oleh Perusahaan, hingga dan termasuk pemutusan hubungan kerja.

2 TANGGUNG JAWAB KARYAWAN DAN MITRA BISNIS YANG TERLIBAT DALAM URUSAN INTERNASIONAL

Semua pihak—karyawan, agen dan mitra bisnis lainnya—yang tugas-tugasnya kemungkinan akan melibatkan atau mencakup salah satu bidang yang diatur oleh FCPA dan undang-undang anti-korupsi lainnya yang berlaku, harus memahami dan mematuhi Kebijakan ini serta Panduan Kepatuhan Anti-Korupsi Kepatuhan juga kebijakan dan prosedur setempat. Secara berkala pernyataan kepatuhan dan keikutsertaan dalam sesi pelatihan dari waktu ke waktu akan diminta.

3 MENGAJUKAN PERTANYAAN DAN MELAPORKAN MASALAH

Jika Anda merasa bahwa sebuah kebijakan telah dilanggar, atau memiliki pertanyaan tentang Kebijakan, transaksi dengan Pejabat Pemerintah atau praktik pembayaran, Anda harus mendiskusikannya dengan atasan. Jika Anda merasa tidak nyaman berdiskusi dengan atasan, Anda memiliki pilihan lainnya, seperti:

- Manajer tingkat atas berikutnya
- Manajer yang bertanggung jawab atas bidang yang terkait
- Staf Kepatuhan setempat
- Departemen Legal atau Kepatuhan Perusahaan
- Hubungi salah satu staf kepatuhan yang ditunjuk:
  - Dean Falgoust di 504-582-4206 (email: Dean_Falgoust@fmi.com)
  - Cathy Hardwick di 602-366-8363 (email: Cathy_Hardwick@fmi.com)
  - Michael Pass di 602-366-8157 (email: Michael_Pass@fmi.com)
- Saluran FCX Compliance Line melalui telepon (nomor telepon untuk wilayah geografis Anda tersedia di situs intranet lokal Anda, pembuatan laporan secara anonim dapat dilakukan, kecuali untuk Spanyol[i])

Mitra bisnis juga dapat mendiskusikan pertanyaan atau melaporkan kekhawatiran dengan menggunakan salah satu saluran di atas.

Catatan: *Perusahaan tidak akan mentoleransi pembalasan terhadap setiap karyawan yang dengan wajar dan atas maksud baik mengajukan pertanyaan atau menyampaikan kekhawatiran tentang Praktik bisnis atau kepatuhan Perusahaan dengan undang-undang atau peraturan yang berlaku, atau menggunakan Saluran FCX Compliance Line.*

4 KEBIJAKAN DAN PROSEDUR TERKAIT

Silakan lihat daftar di bawah ini untuk mengetahui kebijakan dan prosedur terkait:

- Panduan Anti-Korupsi
- Prinsip-Kode Etik Bisnis (PBC)
- Buku Saku Anti-Korupsi (turuan yang ada)

---

[i] Undang-Undang Perlindungan Data Spanyol (Undang-Undang Organik 15/1999 tentang Perlindungan Data Pribadi) melarang pelaporan anonim.